

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Korea Selatan telah melakukan sejumlah upaya untuk melakukan rekonsiliasi dengan Korea Utara sejak Perang Korea berakhir.¹ Korea Selatan mengeluarkan berbagai strategi kebijakan unifikasi kepada Korea Utara dari periode ke periode. Dimulai pada tahun 1973, Presiden Korea Selatan Park Chung Hee mencetuskan *Special Foreign Policy Statement Regarding Peace and Unification*.² Presiden selanjutnya, Chun Doo Wan mengeluarkan *New Peaceful Unification Formula*. Melalui kebijakan ini, Chun Doo Wan mengusulkan pertukaran delegasi tingkat tinggi dalam sebuah pertemuan konferensi tingkat tinggi antara pemimpin kedua Korea.³

Pada masa pemeritahan Roh Tae Woo, tercetuslah konsep Korea *Commonwealth Unification* pada tahun 1989 yang berisi rencana unifikasi secara bertahap yang berlandaskan pada kebebasan, perdamaian, dan demokrasi.⁴ Konsep tersebut kemudian dilanjutkan oleh Presiden Kim Young

¹ History, Armistice ends the Korean War, (<http://www.history.com/this-day-in-history/armistice-ends-the-korean-war>) (diakses pada 20 Oktober 2010)

² Norman D Levin dan Han Sup Yong, *Sunshine in Korea*, (California: The RAND Cooperation, 2001), 7

³ Levin dan Yong, *Sunshine in Korea*, 8

⁴ Kim Keun Sik, "Inter Korean Relation and the Future of the *Sunshine Policy*", *The Journal of East Asia Affairs* Vol. (Spring 2002): 101-102

Sam yang mengusulkan *Four Party Talk* antara Amerika Serikat, Cina, dan kedua Korea, sebagai sarana untuk membawa Korea Utara ke dalam diskusi bersama Korea Selatan.⁵ Pada tahun 1994, Kim Young Sam mengungkapkan bahwa masalah Korea Utara adalah masalah bagi Korea Selatan juga dan untuk membuktikan ucapannya Korea Selatan menyumbang sebanyak 150.000 ton beras untuk Korea Utara yang sedang mengalami krisis pangan. Bantuan tersebut merupakan pertama kalinya bagi Korea Selatan mengirimkan bantuan secara langsung untuk Korea Utara.⁶

Berakhirnya masa pemerintahan Kim Yong Sam dan dilantiknya Kim Dae Jung sebagai presiden baru pada tahun 1998 menjadi awal yang baru bagi hubungan kedua Korea. Kim Dae Jung yang dikenal sebagai sosok yang memiliki reputasi sangat baik di luar negeri terutama Jepang dan Amerika Serikat karena pro terhadap demokrasi dan anti otoriter.⁷ Setelah menjadi presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung percaya bahwa ia dapat mendapatkan kepercayaan dari Korea Utara dengan kesabaran dan kebaikan tanpa menghiraukan dinamika politik yang terjadi di Semenanjung Korea.⁸ Oleh karena itu, Kim Dae Jung memiliki pandangan yang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang hanya berfokus pada kebijakan unifikasi Korea secara *de facto*, Kim Dae Jung menyadari bahwa Korea harus mencapai

⁵ Levin dan Yong, *Sunshine in Korea*, 9

⁶ Levin dan Yong, *Sunshine in Korea*, 10

⁷ Lee Sung Yoon, "Engaging North Korea: The Clouded Legacy of South Korea's *Sunshine Policy*", *American Enterprise Institute for Public Research*, (Spring 2010): 2

⁸ Yoon- Lee Sung, *Engaging North Korea: The Clouded Legacy of South Korea's *Sunshine Policy**, 2.

unifikasi secara *de jure* terlebih dahulu melalui rekonsiliasi dan kerjasama yang saling menguntungkan.⁹

Pandangan dari Kim Dae Jung tersebut akhirnya diwujudkan melalui terbentuknya *Sunshine Policy* pada tahun 1998 yang mana menggantikan *engagement policy* Korea Selatan terhadap Korea Utara. *Sunshine Policy* bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar Korea dengan mempromosikan perdamaian, rekonsiliasi, dan kerjasama.¹⁰ Melalui *Sunshine Policy*, kedua Korea berhasil mengadakan pertemuan bilateral di Korea Utara. Pada tahun 2000, Kim Dae Jung melakukan perjalanan ke Pyongyang yang mana untuk pertama kalinya pemimpin kedua Korea bertemu sejak Perang Korea pada tahun 1953.¹¹ Dari pertemuan bilateral tersebut, Presiden Kim dan Presiden Kim Jong Il menghasilkan *North-South Joint Declaration 2000* yang menjadi dasar dokumen kedua Korea untuk hidup berdampingan dengan damai dan mencapai unifikasi nasional.¹² Pasca pertemuan bilateral tersebut kedua Korea terus menjalin kembali komunikasi yang sempat terputus selama bertahun-tahun.

⁹ Sik-Kim Keun, *Inter Korean Relation and the Future of the Sunshine Policy*, 101- 102.

¹⁰ Paik Hak Soon. "Assessment Of The *Sunshine Policy*: A Korean Perspective", *Asian Perspective* Vol. 26, No. 3 (2003): 14

¹¹ San Sin Swe, What Happened To North Korea the *Sunshine Policy*, <http://ivn.us/2013/04/20/what-happened-to-north-korea-the-sunshine-policy/> (Di akses pada 15 Juli 2014)

¹² Chung In Moon, "The Kim Dae Jung Government's Peace Policy Toward North Korea", *Asian Perspective* Vol. 25, No. 2 (2002): 178

Sejak pertemuan bilateral tersebut, kedua Korea mengadakan pembicaraan tingkat kementerian sebanyak empat kali berturut-turut dan satu kali pembicaraan mengenai pertahanan.¹³ Dari segi pertahanan, *Sunshine Policy* pada masa pemerintahan Kim Dae Jung berhasil menghilangkan propaganda perang sepanjang Zona Demiliterisasi yang mana sedikit mengurangi ketegangan antar kedua Korea.¹⁴ *Sunshine Policy* tak hanya berdampak pada hubungan kedua Korea, namun juga Korea Utara itu sendiri. Karena *Sunshine Policy*, Korea Utara mulai bersifat transparan dan akuntabel dengan menunjukkan anggota-anggota dalam pemerintahan melalui pertemuan diplomatik, serta melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat.¹⁵ Pada tahun 2001, Presiden Korea Utara Kim Jong In melakukan kunjungan ke Shanghai yang mana melambangkan dari perubahan sikap dari Korea Utara.¹⁶

Meskipun pemerintahan Kim Do Jung berakhir, *Sunshine Policy* terus membawa dampak positif terhadap hubungan antar kedua Korea. Di bawah pemerintahan Roh Moh Hyun sangat terlihat jelas bahwa rekonsiliasi hubungan antar kedua Korea melalui kerjasama ekonomi menjadi prioritas utama. Dapat dikatakan bahwa masa pemerintahan Roh Moh Hyun merupakan periode puncak dari *Sunshine Policy*. Hal tersebut terlihat dari hubungan baik Roh Moh Hyun dengan Kim Jong Il sebagaimana Roh Moh Hyun

¹³ Chung In Moon, *The Kim Dae Jung Government's Peace Policy Toward North Korea*, 179

¹⁴ Chung In Moon, *The Kim Dae Jung Government's Peace Policy Toward North Korea*, 180

¹⁵ Chung In Moon, *The Kim Dae Jung Government's Peace Policy Toward North Korea*, 181

¹⁶ Chung In, Moon, *The Kim Dae Jung Government's Peace Policy Toward North Korea*, 182

mengungkapkan dalam sebuah wawancara setelah Roh Moh Hyun melakukan pertemuan dengan Kim Jong Il di Pyongyang pada tahun 2007, "North Korean leader Kim Jong-il is someone who is open to communication. Kim is the person I felt was the most flexible in North Korea, while the other officials seemed very rigid." ¹⁷

Pemerintahan Roh Moh Hyun berusaha keras untuk memajukan hubungan ekonomi antar Korea dengan mendukung proyek-proyek ekonomi, yaitu pertama; dibukanya Komplek Industri Kaesong di Korea Utara pada tahun 2002. Di kawasan Industri Kaesong terdapat 123 pabrik-pabrik yang memperkerjakan buruh dari kedua Korea.¹⁸ Proyek kedua adalah wisata Gunung Kunggam di Korea Utara akhirnya juga dibuka untuk turis dari Korea Selatan.¹⁹

Proyek ketiga adalah penyambungan kembali jalur kereta api dari Seoul-Shinuju yang mana menghubungkan lintasan dari stasiun Dorasan ke Stasiun Kaesong. Jalur kereta api lintas batas yang dibuka pada tahun 2004 ini kemudian juga diikuti oleh pembangunan jalan tol yang menghubungkan jalur Jeojin dan Onjin. Jalur ini menjadi jalur strategis yang digunakan oleh para pekerja Korea Selatan untuk pergi ke Komplek Industri Kaesong yang terletak di Korea Utara, selain itu juga digunakan oleh para turis yang ingin berwisata

¹⁷ Chosun Media. Roh Regretted 'Big Mistake' of His Presidency, 2009. http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2009/09/22/2009092200718.html (diakses pada 23 September 2014)

¹⁸ Swe San Sin. "What Happened To North Korea the *Sunshine Policy*"

¹⁹ Swe San Sin. "What Happened To North Korea the *Sunshine Policy*"

ke Gunung Kunggam²⁰. Wisata Gunung Kunggam ini berhasil menarik perhatian turis dari Korea Selatan sebanyak 1,2 juta sejak dibuka pada tahun 2003.

Namun pada masa pemerintahan Lee Myung Bak yang dimulai sejak tahun 2008, *Sunshine Policy* mulai tidak digunakan sebagai *engagement policy* untuk Korea Utara. *Sunshine Policy* resmi diberhentikan oleh pemerintahan Korea Selatan berdasarkan laporan dari Kementerian Unifikasi Koreaa, sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

“Despite outward development over the past decade, inter-Korean relations have been under criticism from the public in terms of quality and process..... They have in fact become increasingly disillusioned with the North and more worried about security as the North continued its nuclear arms program..... The sinking of the South Korean warship, the Cheonan, which killed 46 sailors earlier this year, showed that the North is ”²¹

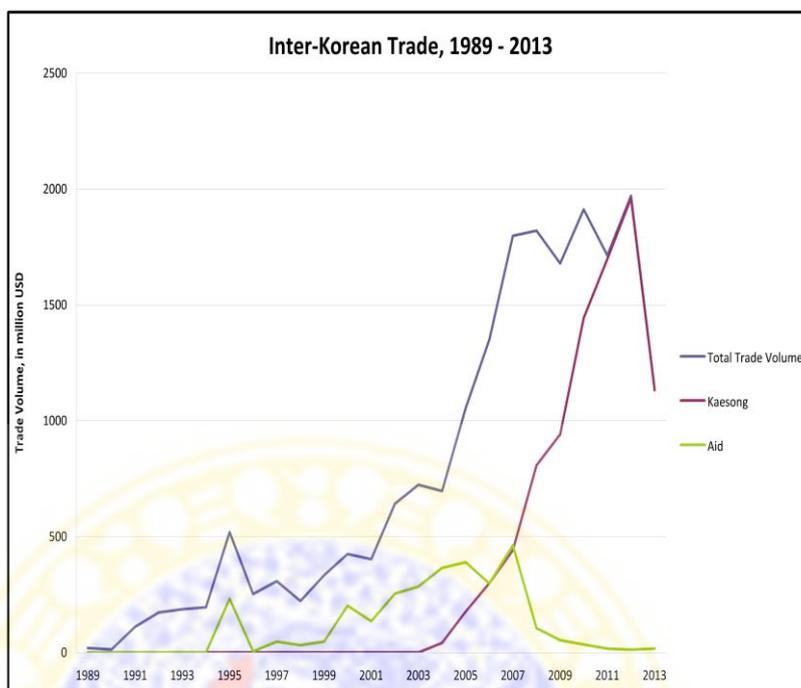
Lee Myung Bak menganggap bahwa *Sunshine Policy* berjalan tidak efektif karena meskipun Korea Selatan terus memberikan bantuan sejak tahun 1998 namun perilaku Korea Utara tetap tidak berubah karena terus memelihara nuklir, oleh karena itu Korea Selatan kemudian memutuskan untuk berhenti melakukan pengiriman bantuan ke Korea Utara.²² *Sunshine Policy* tidak lagi digunakan maka terjadi perubahan drastis terhadap hubungan kedua negara.

²⁰ Kim Hong Nack, “South-North Korean Relations Under The Roh Moo-Hyun Government” *International Journal of Korean Studies* Vol. X, No. 1 (2006): 39-40

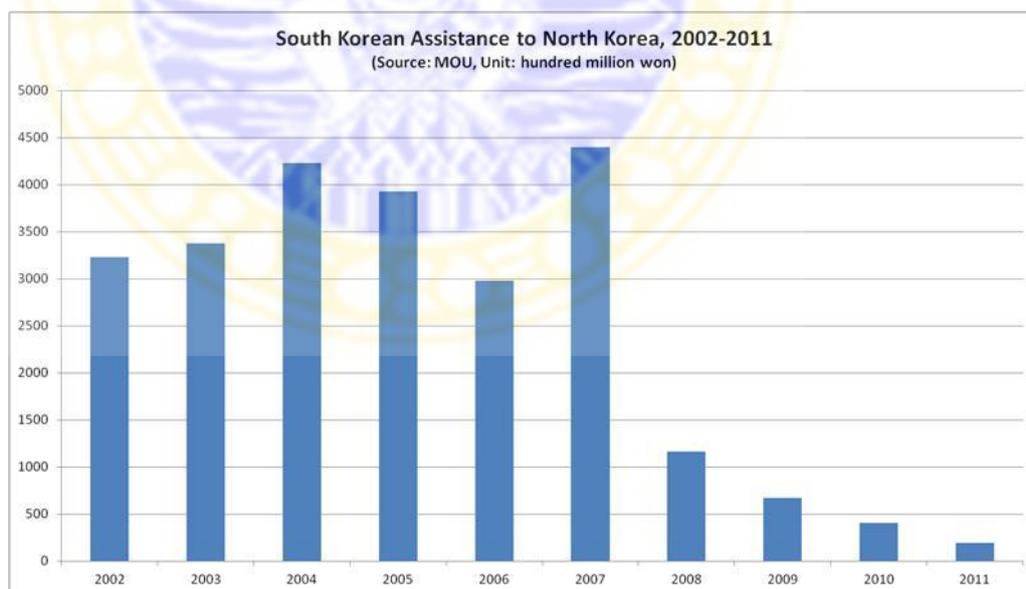
²¹ CNN. South Korea: Policy of engagement with North is a failure, <http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/11/19/south.korea.sunshine.policy/> (diakses pada 26 September 2014)

²² Ronald, Popeski. “*Sunshine Policy* failed to change North Korea: report”, *Reuters*, 2010, <http://www.reuters.com/article/2010/11/18/us-korea-north-sunshine-idUSTRE6AH12520101118> (Diakses pada 15 Juli 2014)

Grafik 1.1 Perdagangan Antar Korea tahun 1989-2013²³



Grafik 1.2. Bantuan Korea Selatan ke Korea Utara tahun 2002-2011²⁴



²³ The National Committee on North Korea. "An Overview of Inter-Korean Relations". <http://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/an-overview-of-south-korea2019s-dprk-policy> (diakses pada 15 Juli 2014)

²⁴ Peterson Institute for International Economics. "South Korean Public Opinion on Aid to North", koreapiie.com/nk/?p=8231 (diakses pada 15 Juli 2014)

Sebagaimana yang terlihat dari kedua grafik diatas bahwa sejak *Sunshine Policy* diberhentikan pada tahun 2010 terjadi penurunan signifikan dalam Industri Kaesong yang mana merupakan hasil dari *Sunshine Policy*, perdagangan pun semakin menurun, begitu juga dengan pengiriman bantuan. Oleh karena itu, kiranya menjadi persoalan karena seperti yang telah diungkapkan bahwa keinginan Korea Selatan sangat kuat dalam unifikasi Korea dan memang bukan hanya pada masa pemerintah Lee Myung Bak, Korea Utara terus membangun nuklir. Diberhentikannya *Sunshine Policy* justru dinilai akan memperburuk hubungan antar Korea karena dilihat dari berbagai bentuk implementasi dari *Sunshine Policy* telah memberikan dampak yang positif secara signifikan terhadap hubungan antar kedua Korea yang selama ini dinilai tidak bersahabat.

I.2. Rumusan Masalah:

Bagaimana karakteristik dari ketiga presiden Korea Selatan yaitu Kim Dae Jung, Roh Moo Hyun, dan Lee Myung Bak memengaruhi terhadap implementasi *Sunshine Policy* ?

I.3. Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan *Sunshine Policy* dianggap gagal dan diberhentikan oleh Kementrian Unifikasi Korea pada tahun 2010 setelah memberikan sejumlah dampak positif terhadap hubungan Korea Selatan dan Korea Utara.

I.4. Kerangka Pemikiran

I.4.1. Tingkat Analisis

Terdapat berbagai macam fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional termasuk dinamika dari suatu kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, untuk memahami suatu fenomena diperlukan analisis yang dinamis dan mendalam. Patrick Morgan menawarkan lima tingkat analisis yang dapat digunakan untuk menelaah perilaku aktor-aktor hubungan internasional, antara lain:

I.4.1.1. Tingkat analisis individu

Berlandaskan pada asumsi bahwa setiap fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional merupakan dampak dari perilaku-perilaku tiap individu yang terlibat di dalamnya.²⁵ Tokoh-tokoh utama pembuat kebijakan seperti kepala pemerintahan, menteri luar negeri, penasehat keamanan memiliki posisi yang sangat krusial dalam tingkat analisis ini. Tingkat analisis ini menuntut seorang peneliti untuk melihat sikap dan perilaku pembuat kebijakan tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mereka membuat keputusan, persepsi dan mispersepsi apa yang mereka pegang, cara mereka berinteraksi dengan kelompok kecil dan kelompok unggul, dan lainnya.²⁶

Selain itu karakteristik para pembuat kebijakan juga perlu

²⁵ Mas' oed Mohtar, "Tingkat-tingkat Analisis", dalam *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta:LP3E, 1990) , 3

²⁶ Laura Neack, "The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era". (Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, 2008)

diperhatikan seperti kondisi psikologis, faktor lingkungan, emosi dan karakter pemimpin sang pembuat keputusan.

I.4.1.2. Tingkat Analisis Kelompok

Berangkat dari asumsi bahwa fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional merupakan tindakan antar kelompok kecil yang memengaruhi seperti kabinet pemerintahan, departemen dan badan pemerintahan, organisasi, sampai kelompok kepentingan.²⁷ Tingkat analisis ini menuntut peneliti harus fokus pada perilaku kelompok dan organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional karena tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan yang diambil oleh seorang pembuat kebijakan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman bahwa kebijakan luar negeri dibuat melalui hierarki organisasi.²⁸

I.4.1.3. Tingkat Analisis Negara-Bangsa

Mengungkapkan bahwa fenomena dalam hubungan internasional terjadi karena perilaku negara-bangsa karena pada dasarnya hubungan internasional didominasi oleh interaksi antar negara-bangsa.²⁹ Oleh karena itu perlu bagi seorang peneliti untuk

²⁷ Mas' oed, Muhtar. "Tingkat-tingkat Analisis", 6

²⁸ Neack, Laura, "The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era"

²⁹ Mas' oed, Muhtar, "Tingkat-tingkat Analisis", 6

melihat dari sudut pandang negara-bangsa sebagai kesatuan yang utuh.³⁰ Tingkat analisis ini menekankan perilaku negara-bangsa sebagai faktor penentu dinamika hubungan internasional. Penting bagi peneliti untuk juga mempelajari pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara-bangsa.³¹

I.4.1.4. Tingkat Analisis Kelompok Negara

Era kontemporer tentunya memunculkan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional, tidak hanya negara sebagai satu kesatuan utuh namun negara-negara tersebut membentuk kelompok-kelompok yang mana menjadi faktor penentu dinamika dari sebuah fenomena.³² Hubungan internasional dianggap sebagai pola perilaku dari interaksi kelompok-kelompok negara karena negara tidak hanya melibatkan negaranya sendiri namun juga bertindak sebagai anggota dari suatu kelompok. Oleh karena itu, untuk menganalisis fenomena yang terjadi perlu untuk mengkaji negara-negara yang bergabung dalam pengelompokan aliansi, kepentingan, persekutuan dagang, sampai blok ideologi.³³

³⁰ Mas' oed, Muhtar, "Tingkat-tingkat Analisis", 6

³¹ Mas' oed, Muhtar, "Tingkat-tingkat Analisis", 6

³² Mas' oed, Muhtar, "Tingkat-tingkat Analisis", 6

³³ Mas' oed, Muhtar, "Tingkat-tingkat Analisis", 6

I.4.1.5. Tingkat Analisis Sistem Internasional

Berangkat dari asumsi bahwa segala interaksi yang terjadi dalam hubungan internasional merupakan satu sistem yang mana struktur dan perubahan di dalam sistem tersebut menjadi faktor yang menentukan dinamika dari sebuah fenomena. Oleh karena itu, perlunya bagi seorang peneliti untuk mengamati sistem dan membuat generalisasi terhadap sistem tersebut sebagai suatu keseluruhan, yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku aktor-aktor hubungan internasional yang terlibat di dalamnya.³⁴

Dari kelima tingkat analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini akan menggunakan tingkat analisis individu yaitu melihat dari ketiga presiden yang memimpin Korea Selatan pada saat *Sunshine Policy* masih dijalankan sejak tahun 1998 sampai tahun 2010, karena *Sunshine Policy* sendiri pada mulanya merupakan hasil pemikiran dari presiden Kim Dae Jung yang kemudian dijalankan oleh kedua presiden berikutnya.

I.4.2. Ideosinkretik

Ideosinkretik merupakan pendekatan yang berfokus pada individu yang menjadi salah satu variable yang memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Ideosinkretik berkaitan dengan persepsi, citra, dan karakteristik pribadi sang pembuat kebijakan yang dipengaruhi oleh pengalaman

³⁴ Mas'ood, Muhtar, "Tingkat-tingkat Analisis", 6

psikologis dan sejarah yang dialami oleh pembuat kebijakan tersebut.³⁵ Karakteristik individu para pemimpin mampu memberikan pengaruh tertentu terhadap hasil sebuah proses politik.³⁶ Tak kalah pentingnya personalitas dari seorang pemimpin karena memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika dari sebuah kebijakan luar negeri.

Mas'ood Muhtar mengungkapkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa individu dapat memengaruhi sangat krusial, yaitu pertama adalah bahwa negara tidak melakukan tindakan, melainkan para pemimpinnya sebagai pemegang kewenangan tertinggi; kedua adalah keterlibatan seseorang tertentu dalam situasi dapat menimbulkan akibat yang berbeda; ketiga adalah dinamika politik internasional pada akhirnya datang dari hakekat manusia yang paling dalam.³⁷ Ideosikrentik terdiri dari elemen-elemen seperti sejarah hidup individu, pandangannya terhadap dunia, nilai-nilai yang mempengaruhinya, kepribadiannya, serta perilaku politiknya.³⁸

Pendekatan ini secara mendalam bertujuan untuk mengetahui karakteristik seorang pemimpin dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Hermann mengungkapkan situasi ketika karakteristik individu seorang pemimpin atau pembuat kebijakan paling memengaruhi dalam pembuatan kebijakan luar negeri adalah dalam situasi sebagai berikut: (1)

³⁵ Bruce Russett dan Harry Starr, "World Politics: The Menu For Choice", 2nd edition (New York: W.H Freeman & Co, 1985), 196

³⁶ Theodore A. Columbus dan James H. Wolfe "Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power", (Bandung: CV Abardin), 1990, 78

³⁷ Muhtar Mas'ood, "Tingkat-tingkat Analisis", 2

³⁸ Muhtar, Mas'ood, "Tingkat-tingkat Analisis", 3

ketika negara sedang memiliki kepentingan luar negeri tertentu yang mana kepentingan tersebut diusung oleh pemimpin negara (2) ketika power negara lain dinilai sebagai nilai yang dramatik; (3) ketika pemimpin negara bersifat karismatik; (4) ketika pemimpin negara memiliki kewenangan yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri; (5) ketika organisasi yang menangani kebijakan luar negeri kurang berkembang; (6) ketika negara dalam situasi krisis; (7) ketika situasi eksternal diartikan sebagai sesuatu yang ambigu.³⁹

Situasi-situasi tersebut kemudian dipertegas oleh Greenstein, yang mana ia mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat empat situasi yang dapat menjadikan seorang pemimpin memiliki pengaruh yang krusial, yaitu; (1) ketika aktor menguasai suatu lokasi strategis tertentu; (2) ketika situasi bersifat ambigu atau tidak stabil; (3) ketika tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan acuan yang dapat membantu proses pembuatan dan dinamika dari kebijakan luar; (4) ketika tindakan spontan sedang dibutuhkan.⁴⁰

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa karakteristik individu dari seorang pembuat kebijakan, terutama pemimpin negara memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kebijakan luar negeri dan segala dinamika yang terjadi. Oleh karena itu, penulis juga menggunakan

³⁹ Post Jerol M, "The Psychological Assessment of Political Leaders". (Michigan: The University of Michigan Press), 2003, 97

⁴⁰ Post, Jerold M, "The Psychological Assessment of Political Leaders", 80

pendekatan ideosinkretis. Penulis akan menelaah karakteristik ketiga presiden Korea Selatan, terutama presiden Lee Myung Bak karena pada saat pemerintahannya *Sunshine Policy* dinyatakan gagal oleh Kementerian Unifikasi Korea. Untuk mempermudah dalam proses analisis, penulis mengamati setiap elemen karakteristik yaitu sejarah hidup individu, pandangannya terhadap dunia, nilai-nilai yang mempengaruhinya, kepribadiannya, serta perilaku politiknya

I.4.3. Bayesian Realisme dan Pendekatan Bayesian Korea

Bayesian Realisme adalah suatu pendekatan yang dikembangkan oleh Andrew H. Kydd pada tahun 2005. Teori Bayesian menjadi dasar dari pendekatan ini. Bayesian digunakan untuk menganalisis situasi yang satu pihak tidak mengetahui secara pasti terhadap perilaku pihak lain⁴¹. Ketika suatu negara tidak memiliki kepastian terhadap informasi yang terjadi di negara lain, maka negara tersebut akan mengambil langkah-langkah tertentu sebagai tanggapan dari perilaku negara lain.⁴² Teori Bayesian mempertanyakan bagaimana negara-negara membangun persepsi terhadap satu sama lain, dan bagaimana perilaku negara-negara dalam menanggapi persepsi tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Kydd kemudian mengembangkan teori Bayesian dengan memasukkan asumsi-asumsi

⁴¹ Andrew H Kydd. "Trust and Mistrust in International Relations" , *Princeton University Press*, 2010, <http://press.princeton.edu/chapters/s8091.html> (Diakses pada 15 Juli 2014)

⁴² Andrew H, Kydd, "Trust and Mistrust in International Relations"

realis. Teori Bayesian Realism berangkat dari asumsi *defensive realist*, yaitu bahwa negara-negara dengan kepentingan yang lunak akan cenderung percaya satu sama lain sehingga pada akhirnya mereka dapat membentuk hubungan kerjasama.⁴³ Sebaliknya, negara-negara yang memiliki kepentingan yang keras dan mereka mengetahui satu sama lain terhadap hal tersebut, maka cenderung akan menaruh curiga satu sama lain yang mana akan membawa hubungan mereka ke arah konflik.⁴⁴ Intinya, dapat dikatakan bahwa Bayesian realisme berargumen bahwa konflik merupakan hasil dari salah persepsi dan ketidakpercayaan yang terjadi antar negara-negara.⁴⁵ Kydd menegaskan bahwa kepercayaan dan ketidakpercayaan merupakan konsep yang penting dalam memahami pola-pola kerjasama dan konflik yang terjadi di dalam perpolitikan dunia.⁴⁶

Pendekatan Bayesian realisme tersebut diaplikasikan oleh Kim Hee Nim dan Choi Jun Y,⁴⁷ ke dalam hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Mereka menegaskan bahwa dapat dikatakan secara pasti bahwa para pemimpin Korea Selatan menginginkan sebuah rekonsiliasi dengan Korea Utara, namun tidak begitu dengan Korea Utara; perilaku Korea Utara dibagi menjadi dua yaitu *sincere* dan *deceitful*. *Sincere* diartikan jika

⁴³ Andrew H, Kydd, "Trust and Mistrust in International Relations"

⁴⁴ Andrew H, Kydd, "Trust and Mistrust in International Relations"

⁴⁵ David A Welch, "Trust and Mistrust in International Relations by Andrew H. Kydd", *The International History Review* Vol. 28, No.3 (2006): 693

⁴⁶ David A, Welch. "Trust and Mistrust in International Relations", 693

⁴⁷ Kim Hee Nim dan Choi Jun Y merupakan peneliti politik internasional di Universitas Florida. Kedua peneliti secara khusus menganalisis pendekatan Bayesian ke dalam hubungan kedua Korea dalam periode *Sunshine Policy* (Kim Hee Nim dan Choi Jun Y, "Uncertainty in Foreign Policy Making: A Bayesian Game Analysis of Korea", (Florida: Florida State University, 2003), 4-5

Korea Utara bersungguh-sungguh untuk melakukan rekonsiliasi dengan Korea Selatan, sedangkan *deceitful* diartikan jika Korea Utara ternyata hanya memanfaatkan upaya rekonsiliasi yang ditawarkan oleh Korea Selatan untuk terus meminta bantuan dari Korea Selatan.

Pendekatan Bayesian Korea dimulai sejak *Sunshine Policy* dicanangkan untuk Korea Utara. Pendekatan ini memberikan empat kondisi; (1) jika Korea Utara menerima *Sunshine Policy*, maka Korea Selatan mempunyai dua pilihan yaitu memberikan timbal-balik secara penuh atau tidak, namun jika Korea Utara menolak *Sunshine Policy* maka situasi di Semenanjung Korea akan berada dalam *status quo*; (2) Jika dikemudian hari Korea Selatan memutuskan untuk menghentikan *Sunshine Policy*, maka penerimaan Korea Utara terhadap *Sunshine Policy* tidak diterima oleh Korea Selatan. (3) Jika Korea Selatan telah melakukan *Sunshine Policy* secara penuh namun tidak ada balasan dari Korea Utara, hal tersebut berarti bahwa Korea Selatan telah dieksploitasi oleh Korea Utara; (4) Sedangkan kondisi terakhir jika Korea Utara memberikan penerimaan secara penuh terhadap *Sunshine Policy*, maka rekonsiliasi dapat dicapai.⁴⁸

I.5. Sintesis Teori

Fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional, salah satunya merupakan dampak dari perilaku-perilaku individu yang terlibat di dalamnya.

⁴⁸ Nim Kim Hee dan Y Choi Jun, "Uncertainty in Foreign Policy Making: A Bayesian Game Analysis of Korea", 4-5

Tokoh-tokoh utama pembuat kebijakan seperti kepala pemerintahan atau presiden memiliki posisi yang sangat krusial dalam setiap kebijakan yang diputuskan oleh negara. Pentingnya posisi seorang pemimpin negara karena negara tidak melakukan tindakan, melainkan para pemimpinnya sebagai pemegang kewenangan tertinggi, keterlibatan para pemimpin dapat menimbulkan akibat yang berbeda. Oleh karena itu, karakteristik individu para pemimpin mampu memberikan pengaruh tertentu terhadap hasil sebuah proses politik, termasuk kebijakan luar negeri. Sunshine Policy, sebagai kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara juga merupakan hasil pemikiran dari sang pemimpin Korea Selatan, Kim Dae Jung.

Hubungan internasional yang seringkali ditandai oleh hubungan kerjasama atau konflik juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan antar negara-negara. Tingkat kepercayaan tersebut dapat bermacam-macam, seperti perilaku dari satu negara terhadap negara lain. Perilaku tersebut akhirnya juga disebabkan oleh keputusan pemimpin negara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengungkapkan pentingnya pengaruh pemimpin terhadap suatu hubungan antar negara.

I.6. Hipotesis

Berdasarkan sintesis teori di atas maka hipotesis dari penelitian ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh Kim Do Jun, Roh Moo Hyun, dan Lee Myung Bak berperan penting dalam *Sunshine Policy* sehingga Korea Selatan mengimplementasikan Sunshine Policy secara berbeda. Perbedaan implementasi

tersebut ditunjukkan melalui kepercayaan dan ketidakpercayaan terhadap Korea Utara. Rasa ketidakpercayaan muncul karena Korea Selatan menganggap Korea Utara telah melakukan eksploitasi selama *Sunshine Policy* dijalankan, dan oleh karena itu *Sunshine Policy* dinyatakan gagal pada tahun 2010.

I.7. Metodologi Penelitian

I.7.1. Definisi dan Operasionalisasi Konsep

I.7.1.1. Karakteristik Pemimpin

Menurut JP. Chaplin, karakteristik merupakan suatu kualitas atau sifat yang tetap terus-menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi, suatu objek, suatu kejadian. Dapat dikatakan bahwa karakteristik merupakan suatu sifat yang khas, yang melekat pada seseorang atau suatu objek.⁴⁹ Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang memimpin sebuah kelompok, organisasi, atau negara.⁵⁰

Sehingga jika didefinisikan karakteristik pemimpin merujuk pada keistimewaan dan kualitas yang membedakan satu pemimpin dengan pemimpin lainnya. Dengan mengoperasikan konsep ini maka akan dielaborasi setiap karakter dari masing-masing pemimpin Korea Selatan yaitu

⁴⁹ JP, Chaplin, "Psikologi". (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 67

⁵⁰ Oxford Dictionaries, "Leader", , "

<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/leader?q=leader> (diakses 1 September 2014)

Kim Dae Jung, Roh Moooh Hyun, dan Lee Myung Bak.. Perbedaan karakteristik tersebut dipercaya memberikan pengaruh yang krusial dalam kegagalan *Sunshine Policy*.

I.7.1.2. Kepercayaan dan Ketidakpercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa pihak lain lebih memilih melakukan kerjasama yang saling menguntungkan daripada eksploitasi, sedangkan ketidakpercayaan adalah keyakinan bahwa pihak lain lebih memilih mengeksploitasi daripada berkerja sama.⁵¹ Dengan kata lain, untuk menjadi negara yang dapat dipercaya dengan kehormatan, maka negara tersebut harus lebih memilih untuk melakukan kerjasama. Kerjasama antar negara-negara akan mungkin dilakukan jika tingkat kepercayaan mereka melebihi batas-batas minimal. Batas minimal kepercayaan akan bergantung pada toleransi terhadap resiko eksploitasi yang dilakukan oleh pihak lain.⁵²

Kepercayaan dan ketidakpercayaan ini dioperasionalkan sebagai salah satu indikator yang menentukan bagaimana kedua Korea akan mengandalkan kepercayaan dan ketidakpercayaan terhadap satu sama lain

⁵¹ Andrew H, Kydd. "Trust and Mistrust in International Relations"

⁵² Andrew H, Kydd, "Trust and Mistrust in International Relations"

dalam *Sunshine Policy*. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab-bab selanjutnya bagaimana kedua Korea sempat menjalin kerjasama ekonomi dan pariwisata secara intensif pada periode *Sunshine Policy* namun kerjasama tersebut berhenti karena timbulnya rasa ketidakpercayaan.

I.7.1.3. Eksploitasi

Dalam pengertian politik, ekonomi, dan sosiologi, eksploitasi melibatkan hubungan sosial terus-menerus yang mana pihak tertentu diperlakukan tidak adil dalam rangka untuk menguntungkan pihak lainnya.⁵³ Sehingga dalam penelitian ini, eksploitasi akan dioperasionalkan sebagai tindakan balasan dari Korea Utara terhadap *Sunshine Policy* yang dianggap merugikan Korea Selatan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa Lee Myung Bak menganggap bahwa *Sunshine Policy* berjalan tidak efektif karena meskipun Korea Selatan terus memberikan bantuan sejak tahun 1998 namun sikap Korea Utara tetap tidak berubah karena terus memelihara nuklir, oleh karena itu Korea Selatan kemudian memutuskan untuk berhenti melakukan pengiriman bantuan ke Korea Utara.⁵⁴

⁵³ Princeton. "Exploitation", <https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Exploitation.html> (diakses 1 September 2014)

⁵⁴ Popeski Ronald, "*Sunshine Policy* failed to change North Korea: report"

I.7.1.4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan seperangkat aktivitas dan operasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan dari sebuah kebijakan yang telah dilegalkan.⁵⁵ Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi implementasi dari sebuah kebijakan, seperti proses kebijakan, aktor yang terlibat dalam proses penyusunan, sampai konteks perancangan bagaimana kebijakan tersebut akan dijalankan.⁵⁶ Terdapat tujuh dimensi yang mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan yaitu; (1) isi dari kebijakan; (2) konten sosial, politik dan ekonomi; (3) kepemimpinan pada saat kebijakan diimplementasikan; (4) pemangku kepentingan; (5) perencanaan implementasi; (6) operation and services; (7) feedback terhadap hasil dari kebijakan.⁵⁷

Dalam penelitian ini, konsep implementasi akan dikonsentrasikan pada dimensi kepemimpinan pada saat *Sunshine Policy* dijalankan antara tahun 1998 sampai tahun 2010 yaitu pada masa pemerintahan Kim Dae Jung, Roh

⁵⁵ Bhuyan, A., A. Jorgensen, dan S. Sharma. "Taking the Pulse of Policy: The Policy Implementation Assessment Tool". (Washington, DC: Futures Group, 2010): 2

⁵⁶ Bhuyan et al, "Taking the Pulse of Policy: The Policy Implementation Assessment Tool". 2

⁵⁷ Bhuyan et al, "Taking the Pulse of Policy: The Policy Implementation Assessment Tool". 5

Moo Hyun, dan Lee Myung Bak. *Sunshine Policy* memiliki prinsip-prinsip yang harus direalisasikan agar kerjasama dan rekonsiliasi kedua Korea dapat benar-benar dapat berjalan.

I.7.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe eksplanatif yaitu penelitian yang mendasar pada penjelasan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel.⁵⁸ Karakteristik para presiden Korea Selatan dan implementasi *Sunshine Policy* diekspansi yang mana menjadi landasan penelitian dalam menemukan kesimpulan yang komprehensif.

I.7.3. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dalam satu ruang lingkup yaitu *Sunshine Policy* sebagai pilar dari kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara, sehingga penelitian ini tidak mencakup keputusan dan kebijakan lain diluar isi-isi asli dari *Sunshine Policy* yang disahkan pada tahun 1998. Sedangkan jangka waktu dari penelitian ini adalah tahun 1998 sampai 2010. Penulis memilih jangka waktu ini karena pada tahun 1998 untuk pertama kalinya *Sunshine Policy* disahkan sebagai kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara dan tahun 2010 karena Kementerian Unifikasi Korea memberikan pernyataan publik bahwa *Sunshine Policy* dinyatakan gagal dan tidak lagi digunakan.

⁵⁸ Ulber Silalahi, "Metodologi Penelitian". (Bandung: Unpar Press, 2006), 310-311

I.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur atau tinjauan pustaka. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, milis resmi, situs berita online, memorandum perjanjian dan sumber-sumber sejenis yang valid.⁵⁹

I.7.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu melalui interpretasi dan penarikan kesimpulan atas data-data yang diperoleh. Teknik analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶⁰ Data-data yang ditemukan kemudian akan dianalisis yang mana peneliti akan melihat keterkaitan antara karakteristik pemimpin Korea Selatan, sikap, dan persepsi kedua Korea terhadap kegagalan *Sunshine Policy*.

I.7.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bagian:

BAB I berisi Pendahuluan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Metodologi Penelitian.

BAB II berisi penjelasan tentang analisis *Sunshine Policy* pada masa pemerintahan Kim Dae Jung.

⁵⁹ Silalahi Ulber, "Metodologi Penelitian", 310-311

⁶⁰ Silalah Uber, "Metodologi Penelitian", 310-311

BAB III berisi analisis *Sunshine Policy* pada masa pemerintahan Roh Moh Hyun

BAB IV berisi analisis *Sunshine Policy* pada masa pemerintahan Lee Myung Bak

Bab V berisi kesimpulan yang komprehensif dari seluruh penelitian yang dijelaskan dari BAB I sampai BAB IV

